

Akurasi Angka Backlog: demi Strategi yang Akurat

(Senin, 21 Januari 2019)

Sudah tentu, untuk mengatasi angka defisit pemilikan rumah (*backlog* perumahan), memerlukan angka/data yang terakurat, dan bisa menjadi acuan semua pemangku kepentingan seperti pemerintah Indonesia, masyarakat, perbankan, pengembang, dan lain-lain. Namun, angka yang sangat pasti tentang kuantitas defisit tersebut, acap simpang siur.

Sudah ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi lembaga utama untuk sumber data kebijakan pemerintahan. Maka seyogianya, bola kini di tangan BPS untuk mengakuratkan angka pasti tentang backlog tersebut. Itu melalui sensus perumahan yang digelar secara komprehensif, serta setelah itu diperbarui lebih sering---misalnya per tahun.

Sudah tentu, tidaklah mudah untuk mengakuratkan data defisit pemilikan rumah tersebut. Apakah 13-an unit? 10-an juta unit? Ataukah 6-7 juta unit? Inilah yang akurasinya perlu didapatkan; angka baru yang akurat tentu lantas sangat memuluskan strategi pemerintah meminimalkan angka defisit tersebut.

Beberapa langkah bisa ditempuh. Semisal, menggunakan sejumlah sumber data lembaga pemerintahan lain ataupun lembaga swasta, sebagai instrumen pembandingan ataupun sebagai alat verifikasi.

Misalnya, pertama, data berisi pembayar PBB (pajak bumi dan bangunan) dari pemda (pemerintah daerah) se-Indonesia, bisa berperan dalam memverifikasi jumlah pemegang sertifikat pemilikan rumah se-Indonesia. Memang, dalam hal ini, aturan kerahasiaan pajak tidak memungkinkan adanya pembukaan identitas

pembayar PBB tersebut. Tetapi, paling tidak, ada gambaran angka keseluruhan dari situ, sebagai pembandingan.

Kedua, data NIK (nomor induk kependudukan) ataupun lainnya dari Kementerian Dalam Negeri, dan data jumlah/kuantitas debitur KPR/KPA *first home buyer* dari regulator ataupun asosiasi perbankan, bisa menjadi instrumen pembaruan per tahun.

Adalah satu keuntungan sangat berarti bahwa BPS pasti sudah memegang basis data populasi raksasa tentang identitas 120-an juta rumah tangga se-Indonesia. Yang perlu digelar, selanjutnya, adalah pembaruan menyeluruh, peningkatan akurasi, verifikasi terkini; semua itu bisa berbasis data dari lembaga lain.

Dengan semua itu, strategi pengurangan defisit pemilikan rumah, otomatis bisa ikut akurat. (*Dhi*)